



Pj. Bupati Pasuruan Hadiri High Level Meeting TP2DD Bersama Seluruh Kepala Daerah di Jatim



No image

Selasa, 7 Mei 2024

Penjabat Bupati Pasuruan, Andriyanto, bersama Plt. Kepala BPKPD, Digdo Sutjahjo, menghadiri High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur. Forum diskusi dan evaluasi ini bertema "Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju". Acara ini dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota di Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, menyatakan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non tunai dan integrasi ekonomi keuangan digital di daerah. Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang disepakati melalui komitmen bersama seluruh TP2DD se-Jawa Timur.

Komitmen ETPD merujuk pada peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dalam kategori "DIGITAL" dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Selain itu, komitmen ETPD juga meliputi optimalisasi penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi Pemerintah Daerah.

High Level Meeting Rakorwil TP2DD se-Jawa Timur merupakan forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dengan TP2DD di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Tujuannya, mendiskusikan isu-isu terkini dan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun Indeks ETPD seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur saat ini masuk kategori Digital dengan rata-rata indeks 95,2 persen, implementasi ETPD di Jawa Timur tetap membutuhkan

peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD. Hal ini penting untuk memonitor implementasi transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.